

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Acmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, 2009
- Amrih Suci, Ivida Dewi. *Hak Kreditor Separatis dalam Meneksekusi Benda Jaminan Kreditor Pailit*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009
- Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Erlina B. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung Press, 2019
- Hartono, Hadisoepaoto. *Segi Hukum Perdata : Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, 1984
- Hadjon Philipus M. , *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2009
- Herowati, Poesoko. *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Laksbang, 2007
- J Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti 1997

Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia:
2014

Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.
1974

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kelsen, Hans. *Pengantar Teori Hukum Murni*. Bandung, Nusa Media: 2010

Michael Nussy dan Ronald Saija, *Hukum Kepailitan : Kreditur Dalam Pailit*,
Yogyakarta : Cetakan pertama, Deepublish, Desember 2020

Michael Nussy dan Ronald Saija, *Hukum Kepailitan : Kreditur Dalam Pailit*,
Yogyakarta : Cetakan pertama, Deepublish, Desember 2020

Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Editor Tribudiyono,
Griya Media, 2011

Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Barakatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat
Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, Yogyakarta:
Cetakan Keempat, Pustaka Pelajar, 2011

_____ *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*,
Yogyakarta: Cetakan Pertama, Media Perkasa, 2013

Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*.
Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010

Rahardjo Satjipto *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012

Retnowulan, Sutan. *Kapita Selektta Hukum Ekonomi dan Perbankan*,
Jakarta: Penerbit Seri Varia Yustisia, 1996

Remy Sjahdeini, Sutan. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 4
Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti: Jakarta, 2002

- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku I*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2009
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Soemarti Hartono, Siti. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*. Yogyakarta. Seksi Hukum Dagang FH UGM.1981
- Solly Lubis, M. *Filsafat Ilmu dan Peneliti*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2006
- Sunbhan, M. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)* Jakarta: Cet. II, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, 2009
- Supramono, Gato. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009
- _____ *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 2003
- Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009
- S. Sastrawidjaja, Man. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, 2006
- S. Gultom, Miranda. "Restrukturisasi Perusahaan, Kaitannya Dengan Situasi Moneter Indonesia", Newsletter-PPH No. 33/X Juni: 1998

Suyanto, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Jakarta : Kencana, 2016

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Victor Situmorang & Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994

Yahya Harahap, M. *Hukum Kepailitan*. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Yuhelson, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo : Ideas Publishing, 2019

JURNAL ILMIAH

Andreas Butar Butar, Amelia Sri Kusuma Dewi, Shanti Riskawati, *Hambatan Kurator dalam Menuntut Penyerahan Benda Agunan yang dikuasai Kreditor Separatis*. Brawijaya Law Student Journal, April 2023

Fathiya Achmad, Permata N. Daulay dan Nurwidiatmo, dengan judul *“Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dilakukan Kreditor Separatis Dalam Keadaan Insolvensi*, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vol. 3 No. 1 ISSN: 2477-4103

Fatih Fauzan, Zulfa Robbi dan Rizal Rustam, *“Eksekusi Jaminan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”*, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Vol. VI No. 2 (2022): 265-271

Fred B.G. Tumbuan, *“Pokok – pokok Undang – undang Tentang Kepailitan sebagaimana diubah oleh PERPU No. 1/1998” dalam Penyelesaian Utang*

- *Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Rudhy A. Lontoh, [Ed](#), Bandung: Penerbit Alumni, 2001
- Halim, Swandy. “*Titik Singgung Kepailitan dan Hak Tanggungan dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Hak Tanggungan*”, Makalah disampaikan pada Seminar Quo Vadis Eksekusi Hak Tanggungan IKA UNPAD Komisariat Fakultas Hukum, Jakarta 26 Juni 2014
- Herman Yusup, *Kedudukan Dan Perlindungan Debitor Atas Kepailitan Kreditor Separatis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penanggungan Dan Kewajiban Membayar Utang*. Tesis Universitas Islam Sultan Agung
- Ida Nadirah, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pelaksanaan Perdamaian Kepailitan*” desertasi Universitas Sumatera Utara
- John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999
- Marissa Kartika Dewi, Dipo Wahyoeono, *Kepastian Hukum Bagi Kreditor Separatis Pemegang Hak Tanggungan Saat Debitor Pailit*, JHP17 (Jurnal Hasil Penelitian) Juli 2022, Vol. 7, No. 2
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “*Saatnya Hati Nurani Bicara*” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009
- Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3 Desember 2014. 3

Ronald Saija, *Problematika Implementasi Eksekusi Harta Pailit oleh Kreditor Separatis dan Kurator Perspektif Keadilan*, KANJOLI Business Law Review, Vol. 2 No. 1, Juni 2024

Siregar, Maria Gabrielle Janice Angelie. *"Eksekusi Jaminan dalam Kepailitan pada Kreditor Separatis Ketika Ditangani oleh Kurator."* Jurist-Diction, Vol. 1, No. 2, 2018

Sularto, *"Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan"*, Mimbar Hukum, Vol. 24 No. 2 (2012): 187-375

Syafrizal, Denny. *"Kepastian Hukum Hak Kurator terhadap Objek Hak Tanggungan dalam Pembersihan Harta Pailit."* Jurnal Notarius, Vol. 7, No. 1, 2024

Tambunan, Daniel Marihot. *"Wewenang Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Jaminan Saat Insolvensi Akibat Gagalnya PKPU."* Jurist-Diction, Vol. 5, No. 6, 2022

Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice*, Philosophy and Public Affairs, 2005

Yuhelson, *"Prioritas Pembagian Harta Kekayaan Debitor Pailit (Boedel Pailit) Terhadap Kreditor Preferen Dan Kreditor Separatis Berdasarkan Prinsip-Prinsip Keadilan Dan Kepastian Hukum"* desertasi Universitas Jayabaya

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pailit dan PKPU

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/KMK.06/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 122/PMK.06/2023: Mencabut PMK 213/2020, memperkuat klasifikasi lelang menjadi lelang wajib dan sukarela, memperluas objek lelang termasuk barang tidak berwujud, serta mendukung pelaksanaan lelang secara elektronik melalui platform resmi